

**Analisis Dana Alokasi Umum Dan Responnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan**



Skripsi Oleh:

INGGIT

NIM 01091002093

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

S
338.907

lbg
9
2014

R. 25696/26207



**Analisis Dana Alokasi Umum Dan Responnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan**



Skripsi Oleh:

INGGRIT

NIM 01091002093

EKONOMI PEMBANGUNAN

*Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**ANALISIS DANA ALOKASI UMUM DAN RESPONNYA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun Oleh :

Nama : INGGRIT
NIM : 01091002093
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Bidang Kajian/Konsentrasi : KEUANGAN DAERAH

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

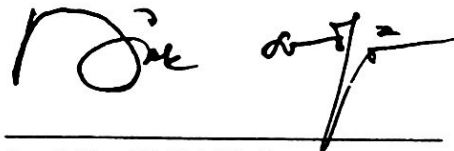
PEMBIMBING SKRIPSI

Dosen Pembimbing

TANGGAL PERSETUJUAN

Ketua

Tanggal : 25 November 2013



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si
NIP. 196007101987031003

Anggota

Tanggal : 25 November 2013



Anna Yulianita, M. Si
NIP. 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS DANA ALOKASI UMUM DAN RESPONNYA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

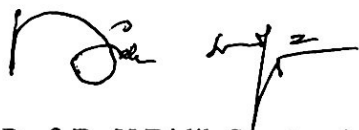
Disusun Oleh :

Nama : INGGRIT
NIM : 01091002093
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Bidang Kajian/Konsentrasi : KEUANGAN DAERAH

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 30 DESEMBER 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 30 DESEMBER 2013

Ketua



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

Anggota



Anna Yulianita, M. Si
NIP. 197007162008012015

Anggota



Dr. Azwardi, M.Si
NIP. 196805181993031003

Anggota



Drs. Nazeli Adnan, M.Si
NIP. 195804171988101002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi pembangunan



Dr. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Inggrit
NIM : 01091002093
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: ANALISIS DANA ALOKASI UMUM DAN RESPONNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pembimbing:

Ketua : Prof. Dr. Didik Susetyo, M. Si

Anggota : Anna Yulianita, M. Si

Tanggal Ujian : 30 Desember

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 3 Januari 2014

Pembuat Pernyataan,



Inggrit

NIM. 01091002093


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Analisis Dana Alokasi Umum dan Responnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan respon Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dosen pembimbing Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si dan Anna Yulianita, M.Si yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Azwardi, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Nazeli Adnan, M.Si, selaku Skretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. Kedua Orang tuaku yang telah memberikan dukungan baik dari moril maupun materil.
6. Teman-teman di Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya Indralaya, yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Indralaya, 3 Januari 2014


Penulis

ABSTRAK

Analisis Dana Alokasi Umum dan Responnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sumatera Selatan

Oleh:

Inggrit; Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si; Anna Yulianita. M.Si

Dana Perimbangan adalah salah satu sumber pendapatan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Salah satu komponen yang ada pada Dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tingkat kepekaan Dana Alokasi Umum yang dianalisis dengan menggunakan Elastisitas. Ruang lingkup dan objek penelitian adalah Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang dianalisis meliputi Dana Alokasi Umum, Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Pegawai Provinsi Sumatera Selatan selama Periode 2003-2011. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki tingkat kepekaan yang cukup baik terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan kata lain, Dana Alokasi umum tetap memberikan pengaruh serta kontribusinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas dan Anggaran pendapatan Belanja Daerah

ABSTRACT

Analysis of General Allocation Fund and Its Response towards
Economic Growth in South Sumatera Province

By:

Inggrit; Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si; Anna Yulianita, M.Si

Fund balance is one of the national income sources stated in local government budget. One of the components in fund balance is general allocation fund. The aim of this research was to assess the sensitivity level of general allocation fund which was analyzed using elasticity. The scope and the object of the research were general allocation fund and economic growth in South Sumatera Province. The data of the research were general allocation fund, revenue of local government budget, expenditure of local government budget, and personnel expenditure in South Sumatera Province in the period of 200–2011. Based on the research findings, it could be concluded that general allocation fund had good sensitivity level to the economic growth. In other words, general allocation fund still give good influence and contribution to the economic growth in South Sumatera Province.

Keywords: general allocation fund, economic growth, elasticity and regional government budget

Translated from the original document by



Muslih Hambali
Instructor of Language Lab
Graduate School of Sriwijaya University

RIWAYAT HIDUP



Nama Mahasiswa : Inggrit
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/19 Juni 1992
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah (Orang Tua) : Jl. Blok Cengkeh Gang Hanura Rt 01 Rw 07 Bogor
Alamat Email : inggritmerry@ymail.com
Pendidikan Formal :
Sekolah Dasar : SDIT Daarul Fataa Bogor
SLTP : SLTP Mandiri Palembang
SMA : SMU Negeri 8 Bekasi
Pendidikan Non Formal : Lembaga Kursus Bahasa Inggris LIA dan Lembaga Kursus Bahasa Inggris English First
Pengalaman Organisasi : Karate UNSRI, GMNI dan KSU-U Read

DAFTAR ISI

NO. DAFTAR : 140256
TANGGAL : 21 JAN 2014

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Pengeluaran pemerintah menurut Hukum Wagner.....	9
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	10
2.1.3 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan daerah	10
2.1.4 Anggaran Pemerintah	11
2.1.5 Dana Perimbangan.....	12
2.1.6 Dana Alokasi Umum	13
2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	16
2.1.8 Teori Elastisitas	17
2.1.9 Administrasi Pemerintahan Daerah	17

2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran	27
2.4 Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	29
3.2 Rancangan Penelitian.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	31
3.5 Teknik Analisis	31
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	35
4.1.2 Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Sumatera Selatan.....	40
4.1.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Selatan	42
4.1.4 Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	44
4.1.5 Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	46
4.1.6 Elastisitas Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	48
4.1.7 Elastisitas Tahun 2003	50
4.1.8 Elastisitas Tahun 2004.....	50
4.1.9 Elastisitas Tahun 2005.....	50
4.1.10 Elastisitas Tahun 2006.....	51

4.1.11 Elastisitas Tahun 2007	51
4.1.12 Elastisitas Tahun 2008	52
4.1.13 Elastisitas Tahun 2009	52
4.1.14 Elastisitas Tahun 2010	53
4.1.15 Elastisitas Tahun 2011	53
4.1.16 Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai.....	53
4.2 Implikasi Penelitian	55
4.3 Pembahasan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
Daftar Pustaka	61
Lampiran-lampiran	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Hasil Pertumbuhan dari Dana Alokasi Umum.....	40
Tabel 4.3 Hasil Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	42
Tabel 4.4 Hasil Kontribusi dari Dana Alokasi Umum dan Total Penerimaan APBD.....	44
Tabel 4.5 Hasil Rasio dari Dana Alokasi Umum dan Total Pengeluaran APBD.....	47
Tabel 4.6 Hasil Elastisitas dari Persentase DAU dan Persentase PDRD Provinsi Sumatera Selatan	49
Tabel 4.7 Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1 Kurva Total Penerimaan.....	45
Gambar 4.2 Kurva Total Pengeluaran.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kajian Ekonomi Regional Triwulan II	65
Lampiran 2. Kajian Ekonomi Regional Triwulan I.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan rakyatnya. Dalam menyelenggarakan kewajiban tersebut diperlukan biaya yang tak sedikit, tanpa biaya maka negara manapun tidak akan sanggup menyelesaikan tugas-tugasnya. Banyak jalan yang akan ditempuh oleh pemerintah guna membiayai kewajiban tersebut. Indonesia memiliki cita-cita Demokrasi Nasional dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata di tiap Provinsi/Kabupaten/Daerah.

Karena cita-cita ini maka munculah suatu yang dinamakan otonomi daerah, pilihan otonomi merupakan jawaban atas masalah yang ditimbulkan dari kecenderungan sentralisasi kekuasaan, karena Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2002: 76).

Dengan adanya Otonomi maka masing-masing daerah yang ada di tiap provinsi mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola segala aset dan jalannya sistem pemerintahan yang ada pada masing-masing provinsi, dengan ini diharapkan dapat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Semakin logis otonomi daerah diberikan karena dengan begitu kesulitan dalam mengurus kepentingan negara yang luas dan banyak dapat diminimalisasi.

Pasca terbentuknya daerah otonom baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. Semakin mempermudah dalam menghadirkan investor yang berminat dalam membuka industri daerah yang menguntungkan (Khairuddin, 2010: 109).

Selanjutnya Khairuddin mengatakan kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja operasional pemerintah daerah. Dari sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang menjangkau seluruh wilayah, sehingga akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan dengan harga yang murah.

Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat. Dengan banyaknya provinsi di Indonesia yang telah memiliki hak otonomi daerah ini menunjukkan bahwa dibutuhkan sumber-

sumber dana yang tidak sedikit, diperlukan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah. Setiap tingkat pemerintahan memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mensejahterakan daerahnya, dan tentunya Pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan. Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang profesional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang dana perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2002: 129).

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memerhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Huda, 2005: 104). Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Yani, 2002: 346).

Penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi penerimaan daerah. Dana perimbangan ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu: 1) Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Umum, dan 3) Dana Alokasi Khusus. Untuk beberapa pemerintah daerah masih akan mendapatkan Dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Beberapa jenis dana perimbangan tersebut sebenarnya dapat dipilah antara jenis dana perimbangan yang bisa dikendalikan daerah dengan yang tidak dapat dikendalikan. Dana bagi hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya, sedangkan untuk Dana Alokasi umum dihitung dengan formula tertentu yang relatif kecil dapat dipengaruhi besarnya oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2010: 27).

Pemerintah dalam melakukan manajemen pengelolaan keuangan daerah tentunya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum adalah *Block Grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan

penyediaan pelayanan publik antara pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004: 30).

DAU merupakan salah satu komponen dana terbesar yang diterima oleh daerah. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk PAD (Adi, 2006: 4). Keadaan ini menunjukkan adanya ketergantungan fiskal yang cukup tinggi yaitu relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat. Tujuan transfer dana dari pusat ke daerah adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan struktur keuangan antar daerah (Kuncoro, 2004: 16).

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah DAU 26 % ini merupakan jumlah DAU untuk seluruh provinsi dan kabupaten/ kota. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi ini belum dapat dihitung secara kuantitatif. Proporsi DAU antara DAU provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN setiap tahun dan bersifat final (Yani, 2009: 142-143).

Hasil riset yang dilakukan Bank Indonesia (2013) memperlihatkan Nominal dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumsel Triwulan I Tahun 2013 dan dari data tersebut bisa diketahui realisasi dari

Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Sumsel yang termasuk didalamnya terdapat Anggaran dari Dana Alokasi Umum pada Tabel 1.1.

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat Realisasi Dana Alokasi Umum Sampai dengan triwulan II 2013 adalah Rp 871 Miliar atau sebesar 58% dari anggaran, sementara dari seluruh Total Pendapatan APBD 2013 adalah sebesar Rp 5768 Miliar dengan realisasi Rp. 2858 atau sebesar 49.6% dari anggaran. Realisasi belanja operasi mencapai Rp. 4,139 miliar atau sebesar 52.3% dari anggaran, sementara realisasi belanja modal sebesar Rp. 1,099 miliar atau sebesar 24% dari anggaran. Adapun secara nominal, realisasi belanja operasi berkontribusi sebesar 85,2% dari total realisasi belanja s.d. triwulan II 2013, sedangkan kontribusi belanja langsung hanya sebesar 10,3%. Berdasarkan pemahaman diatas, maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) dan Responnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan DAU di provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimanakah Respon Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan seberapa besar pertumbuhan DAU di Sumatera Selatan dan menganalisis respon Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat penelitian

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah terutama yang berhubungan dengan peranan atau pengaruh Dana alokasi Umum terhadap suatu pertumbuhan ekonomi. Serta dapat menjadi salah satu sarana untuk mendalami dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dan juga bermanfaat untuk menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktisi

Penelitian ini sebagai gambaran bagi banyak pihak terkait mengenai pengaruh serta respon yang dimiliki Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.

1.5. Sistematika Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tentang analisis dana alokasi umum dan responnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu Teori yang berhubungan dengan dana alokasi umum, PDRB serta pertumbuhan ekonomi. Bab ini juga mengungkapkan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan deskripsi bagaimana penelitian analisis dana alokasi umum merespon pertumbuhan ekonomi, menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi deskripsi dari objek penelitian berupa respon dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan dan keadaan perkembangan PDRB Sumatera Selatan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian.

Daftar Pustaka

- Abdullah. 1983. *Sistem Administrasi Keuangan negara Julid II*. Jakarta: Bhrata karya Aksara.
- Ahmad, Irdam. 2011. "Regional Fiscal Independence In East Java Province Post Regional Autonmy". *Economic Journal Of Emerging Markets*. Diambil Pada Tanggal 15 Juli 2013. STEKPI, dari <http://google.co.id>
- Aryanto, Rudi. 2011. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan". Diambil Pada Tanggal 20 Agustus 2013. *Jurnal lain*. dari <http://google.co.id>
- Badan Pusat Statistik. 2013. "Statistik Indonesia".
- Bank Indonesia. 2013. "Overview Kajian Ekonomi Regional".
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : RajaGrafindo Pustaka.
- Blakely, Edward j. 1988. *Planning Local Economic Development : Theory and Practice*. California : Sage Publication, Inc. Newbury.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Elmi, Bahrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Guinau, Aldrin W. 2012. "Analisis Kemampuan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Dalam Memenuhi Kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Keerom". Diambil pada tanggal 24 Januari 2013. *Jurnal Uncen*, dari <http://google.co.id>
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Penerjemah Sumarno. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Hariyandi, Tengku I, dan Sony Y. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.

- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah perkembangan dan problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ihsanuddin. 2013. "Kenaikkan Gaji PNS Sesuai Inflasi". Diambil pada tanggal 21 Oktober 2013. *Nasional Kompas*, dari <http://google.co.id>
- Jaya, Amir. 2005. "Analisis Pengaruh Anggaran Belanja Daerah (APBD) Dan Investasi Swasta Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tana Toraja". Diambil pada tanggal 24 Januari 2013. *Jurnal Lipi*, dari <http://google.co.id>
- Khairuddin, Ahmad. 2010. *Otonomi daerah, Etnonasionalisme, dan Masa depan Indonesia: persen lagi tanah Dan Air Nusantara Milik rakyat*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Maesaroh. 2013. "Bayar Gaji PNS, Pemerintah habiskan Rp. 88,8 T". Diambil pada tanggal 18 Oktober 2013. *Okezone*, dari <http://google.co.id>
- Magister Agribisnis. 2009. "Dasar Ekonomi Konsep Elastisitas". Diambil pada tanggal 21 Agustus 2013. *Magister Agribisnis wordpress*, dari <http://google.co.id>
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Maryati, Ulfi & Endrawati. 2010. "Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi dan Manajemen". Diambil Pada tanggal 22 Juli 2013. *Universitas Sumatera Utara*, dari <http://google.co.id>
- Nugroho, Fajar dan Rohman Abdul. 2012. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)". Diambil pada tanggal 24 Januari 2013. *Ejurnal undip*, dari <http://google.co.id>
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Prakosa, Kesit Bambang. 2004." Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)". Diambil pada tanggal 13 Maret 2013. *journal uii*, dari <http://google.co.id>
- Samuels, David. 2000, "Fiscal Horizontal Accountability? Toward Theory of Budgetary " Cheks and Balances" in in Presidential System. University of Minnesota. Working Paper. Presented at The Conference on Horizontal Accountability, May.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*.. Baduose Media. Padang-Sumatera Barat.
- Setiyawati, Anis. 2007. "Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur". Diambil pada tanggal 13 Maret 2013 *fe ui*, dari <http://google.co.id>
- Sudana, I Made dan Ni Ketut Sukasih. 2006. "Good Governance Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) dan Implikasinya". Diambil pada tanggal 13 Maret 2013 . *Jurnal Lipi*, dari <http://google.co.id>
- Sukirno, Sadono. 2010. *Mikroekonomi : Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Tarigan, Kristiani. 2011."Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". Di ambil Pada Tanggal 22 Juli 2013. *Skripsi, Universitas Sumatera Utara*, dari <http://google.co.id>
- Udjianto, Didit Welly. 2008. "Analisis Dana Perimbangan Antara Pusat dan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 5". *UPN, Yogyakarta*. Di ambil Pada Tanggal 22 Juli 2013, dari <http://google.co.id>
- Von Hagen, Surgen. 2002. "Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance". *The Economics and Social Review*. 33 (3): 263-284.
- Widjaja, HAW. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. 2002. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Gunawan. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. 2002. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yani, Ahmad, S.H. M.M., Ak. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia* . Jakarta; RajaGrafindo Persada.